

SOP Penanganan Tindak Kriminal (Contoh Orang Asing)

Kategori: K3 (Keselamatan)

No. Dokumen: SOP-0189

Tanggal Terbit: 15/06/2026

Sumber: GajiHub SOP — [sop.gajihub.com](#)

Panduan terstruktur bagi perusahaan dalam menangani tindak kriminal yang melibatkan orang asing secara cepat, aman, dan sesuai hukum di Indonesia.

Tujuan

SOP ini disusun untuk memberikan pedoman yang jelas, sistematis, dan terstandar dalam menangani kejadian tindak kriminal di lingkungan perusahaan, khususnya yang melibatkan orang asing. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keamanan seluruh karyawan, aset perusahaan, serta menjaga kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Selain itu, SOP ini bertujuan meminimalkan risiko kerugian material maupun non-material, mempercepat respons penanganan, serta memastikan koordinasi yang efektif dengan pihak berwenang seperti kepolisian dan instansi imigrasi.

Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh area operasional perusahaan, termasuk kantor pusat, cabang, fasilitas produksi, dan area pendukung lainnya. Ruang lingkup mencakup semua karyawan, tenaga keamanan (security), manajemen, serta pihak ketiga yang berada di lingkungan perusahaan. SOP ini secara khusus mengatur penanganan tindak kriminal seperti pencurian, penipuan, pengrusakan, atau tindakan mencurigakan yang melibatkan warga negara asing (WNA), baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. SOP ini juga mencakup prosedur pelaporan, dokumentasi, hingga koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Definisi

Istilah	Definisi
Tindak Kriminal	Segala bentuk perbuatan melanggar hukum pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti pencurian, penipuan, penggelapan, atau tindakan kekerasan.
Orang Asing (WNA)	Individu yang bukan warga negara Indonesia yang berada di wilayah Indonesia secara sah maupun tidak sah.

Istilah	Definisi
Petugas Keamanan (Security)	Personel yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perusahaan.
Laporan Insiden	Dokumen resmi yang berisi kronologi, pihak terkait, dan tindakan yang diambil terkait suatu kejadian kriminal.
Instansi Berwenang	Lembaga pemerintah seperti Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki kewenangan hukum dalam penanganan tindak kriminal.

Tanggung Jawab

Pihak	Tanggung Jawab
Manajemen Perusahaan	Menetapkan kebijakan, menyediakan sumber daya, serta memastikan implementasi SOP berjalan dengan efektif dan sesuai regulasi.
Tim Keamanan (Security)	Melakukan pengamanan awal, identifikasi kejadian, penanganan situasi darurat, serta koordinasi dengan pihak berwenang.
HRD (Human Resources Department)	Mengelola data karyawan, memberikan dukungan administratif, serta berkoordinasi jika melibatkan tenaga kerja asing.
Karyawan	Melaporkan setiap kejadian mencurigakan atau tindak kriminal kepada pihak keamanan atau atasan langsung.
Legal/Compliance	Memberikan pendampingan hukum serta memastikan semua tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prosedur

Tahap 1: Deteksi dan Pelaporan Awal

Tahap awal dalam mengidentifikasi dan melaporkan adanya indikasi tindak kriminal di lingkungan perusahaan.

- Setiap karyawan atau pihak yang melihat kejadian mencurigakan wajib segera melaporkan kepada petugas keamanan atau atasan langsung.
- Petugas keamanan melakukan verifikasi awal terhadap laporan untuk memastikan validitas kejadian.
- Jika melibatkan orang asing, petugas keamanan mencatat identitas awal seperti nama, kewarganegaraan, dan dokumen identitas yang dimiliki.

Penanggung Jawab: Petugas Keamanan dan Karyawan

Tahap 2: Pengamanan Lokasi dan Individu

Langkah untuk memastikan situasi tetap terkendali dan aman bagi seluruh pihak.

1. Petugas keamanan segera mengamankan lokasi kejadian untuk mencegah eskalasi situasi.
2. Jika pelaku berada di tempat, lakukan pengamanan secara persuasif tanpa kekerasan dan sesuai prosedur hukum.
3. Pastikan tidak ada barang bukti yang hilang atau rusak sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Penanggung Jawab: Petugas Keamanan

Tahap 3: Identifikasi dan Dokumentasi

Proses pengumpulan data dan bukti terkait kejadian kriminal.

1. Mengumpulkan data identitas lengkap orang asing yang terlibat, termasuk paspor, visa, atau izin tinggal.
2. Mendokumentasikan kejadian melalui foto, video, dan catatan kronologi secara detail.
3. Mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian.

Penanggung Jawab: Petugas Keamanan dan HRD

Tahap 4: Koordinasi dengan Instansi Berwenang

Melibatkan pihak eksternal untuk penanganan hukum lebih lanjut.

1. Segera melaporkan kejadian kepada Kepolisian setempat untuk penanganan hukum.
2. Jika melibatkan WNA, lakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi terdekat.
3. Memberikan seluruh bukti dan dokumentasi yang telah dikumpulkan kepada pihak berwenang.

Penanggung Jawab: Manajemen dan Legal/Compliance

Tahap 5: Tindak Lanjut dan Evaluasi

Melakukan evaluasi atas kejadian serta perbaikan sistem untuk mencegah kejadian serupa.

1. Melakukan rapat evaluasi internal untuk meninjau penyebab dan penanganan kejadian.
2. Menyusun rekomendasi perbaikan sistem keamanan dan prosedur operasional.
3. Memberikan pelatihan ulang kepada karyawan terkait kewaspadaan dan pelaporan kejadian kriminal.

Penanggung Jawab: Manajemen dan HRD

Dokumen Terkait

- Form Laporan Kejadian Insiden

- Berita Acara Pemeriksaan Internal
- Surat Laporan Kepolisian
- Checklist Pengamanan Lokasi
- Logbook Keamanan Harian

Referensi

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Peraturan Kapolri terkait penanganan tindak pidana
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait penggunaan tenaga kerja asing